

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang memiliki kepulauan yang cukup luas, kurang lebih sekitar 17,508 pulau sehingga Indonesia dinyatakan sebagai negara maritim yang mempunyai pintu gerbang perdagangan internasional maupun nasional yang sangat pesat perkembangannya, sehingga perlu di dukung dengan sarana transportasi laut yang mendukung sebagai penghubung antar pulau dan Negara. Dalam Peraturan Menteri nomor 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dijelaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan, serta kepelabuhanan merupakan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan yaitu kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Kementrian perhubungan memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pelayanan ini, baik pelayanan antar negara maupun antar pulau di indonesia. Hal tersebut memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayanan ataupun pemberian sarana seoptimal mungkin kepada para pengguna yang bergerak dalam bidang perhubungan khususnya perhubungan laut yang sangat memiliki peran penting dalam hubungan ini, terutama untuk mewujudkan suatu pelayanan yang tertib dan efisien sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku demi mewujudkan keselamatan pada saat berlayar. Pulau Batam merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Pulau ini merupakan pulau yang paling berdekatan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, terpisahkan oleh selat melaka selebar 15 km, dan merupakan kawasan perdagangan bebas FTZ (*Free Trade Zone*), bagian dari kawasan Sijori (Singapura, Johor (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia).

Adapun kendala atau masalah yang dialami dalam pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal sebelum berbasis system, kegiatan pelayanan masih secara manual dan masih menggunakan bentuk fisik (pengisian data masih menggunakan kertas), adapun agen yang tidak mengikuti aturan atau tidak

mempunyai ID card sebagai agen dalam proses penyelesaian maupun pengurusan dokumen kapal dalam ruang lingkup kerja KSOP Batam, komunikasi yang kurang baik antar petugas/pos syahbandar sehingga menghambat kegiatan operasional lapangan menjadi lama.

Sehubungan dengan hal tersebut yang berkaitan dengan masalah yang muncul meliputi prosedur kedatangan maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang **“pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal di Kantor kesyahbandaran sekupang kelas 1 Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas Syahbandar dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Indonesia?
2. Instansi–instansi yang terkait dalam kedatangan dan keberangkatan kapal?
3. Bagaimana prosedur pelayanan *clearance in* dan *clearance out*

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan Kegunaan Penulisan dalam karya tulis ini adalah agar dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui Tugas Syahbandar dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui instansi – instansi yang terkait dalam pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan Sekupang Batam.
 - c. Untuk mengetahui prosedur pelayanan *clearance in* dan *clearance out*.
2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan karya yang penulis harapkan dari praktek ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

- 1) Mengetahui tanggung jawab syahbandar atas jasa angkutan laut untuk keselamatan pelayaran.
- 2) Menginput data KSOP khusus batam dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal.
- 3) Mempelajari tugas syahbandar dan otoritas pelabuhan sebagai petugas di lingkungan pelabuhan dalam pelayanan jasa bagi para agen perusahaan pelayaran.

b. Bagi Pembaca

- 1) Menambah wawasan bagi pembaca tentang Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam hal pelayanan di dunia pelayaran.
- 2) Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang berbagai aspek dan kegiatan operasional perusahaan – perusahaan di lingkungan pelabuhan.

c. Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Penulis berharap karya tulis ini dapat membantu memberi masukan untuk KSOP agar mengetahui kekurangan KSOP dalam hal pelayanan agar lebih efisien kedepannya.

d. Bagi Lembaga Institusi Stimart “Amni” Semarang

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk informasi atau sebagai referensi di perpustakaan kampus, sekaligus sebagai acuan untuk bahan pembelajaran kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh saat penyusunan dan pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada obyek masalah yang dipilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar. Penulis membagi karya tulis yang akan dibuat ini menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dijelaskan tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis. Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal umum maupun media dan *online*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian penulis. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang gambaran umum obyek pengamatan, pembahasan, dan hasil penelitian selama praktek kerja darat yang disusun sesuai dengan kerangka rumusan masalah.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran kepada KSOP Kelas 1 Batam yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai langkah untuk peningkatan produktifitas kerja KSOP Kelas 1 Batam.